

## BAB I

### Tantangan Kelompok Minoritas di Indonesia

#### Sebuah Awal

*“Diversity is not about how we differ. Diversity is about embracing one another’s uniqueness.” – Ola Joseph*

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan negara kepulauan dengan beragam jenis suku, agama, ras, Bahasa daerah dan budaya yang berkembang didalamnya. Keragaman yang ada di Indonesia membuatnya menjadi rentan dengan konflik. ([https://www.academia.edu/28991687/MAKALAH\\_KONFLIK\\_AMBON.docx](https://www.academia.edu/28991687/MAKALAH_KONFLIK_AMBON.docx), di akses pada 9 November 2019). Bisa dilihat mulai dari konflik-konflik yang terjadi diberbagai daerah seperti Aceh, Poso, Kalimantan, Ambon, Papua dan masih banyak lagi. Akibat dari terjadinya konflik tersebut sangat merugikan masyarakat. Dilihat dari beberapa konflik yang terjadi, masyarakat sipil di Indonesia tidak mempunyai kesiapan dalam menghadapi konflik serta situasi pascakonflik. Lambang Trijono menjelaskan, hal itu ditandai dengan adanya kesenjangan antar golongan, etnik, agama dan perbedaan cara hidup dan budaya yang begitu tajam. Di Indonesia, perbedaan sosio-kultural yang dimiliki belum didongkrak oleh kualitas sosial dan kultural yang memadai (Pratama, 2015). Prasangka sekelompok massa (keagamaan) terhadap kepemimpinan minoritas, seperti kasus Gubernur Ahok di Jakarta, juga menjadi penguat masih bekerjanya “curigaisme” yang mengatasnamakan agama dan etnisitas (Minanto, 2015). Di Indonesia imigran (orang Arab, Barat dan khususnya Cina) dan keturunannya, meskipun sudah berstatus WNI namun masih di anggap sebagai “asing” di hadapan mayoritas pribumi. Diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Cina di Indonesia bertumpu pada antinomi biner pri dan nonpri. (Kymlimcka, 2015).

Keberadaan etnis Cina di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, hingga puncaknya pada tahun 2017, isu mengenai etnis Cina serta ketegangan politik dan agama kembali mencuat dipicu oleh beredarnya video dugaan penistaan agama yang dilakukan

oleh Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta pada September 2016. Sejak awal mencalonkan diri, banyak sekali pro dan kontra mengenai hal ini. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam sangat keberatan atas kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang warga dari etnis nonpri dan nonmuslim (<https://www.kaskus.co.id/thread/5923f8e65a516349538b456f/aksi-pro-kontra-ahok-picu-konflik-etnis-dan-agama/>, di akses pada 22 Oktober 2019). Demonstrasi besar-besaran yang diikuti oleh masyarakat muslim dari berbagai daerah kemudian menumbuhkan ketegangan antaragama dan antaretnis (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42184928>, di akses pada 22 Oktober 2019). Bila kita beralih ke media sosial, banyak sekali ujaran kebencian yang ditujukan untuk Ahok. Konflik yang terjadi juga diperparah oleh banyaknya berita bohong (*hoax*) mengenai kasus ini yang beredar di dunia maya. Banyaknya pesan-pesan provokatif yang beredar di sosial media membuat suasana semakin memanas, massa menuntut agar Ahok segera dijadikan tersangka dan dijatuhi hukuman yang setimpal (<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-37843842>, di akses pada 22 Oktober 2019). Meski akhirnya kasus Ahok menemukan penyelesaian namun hingga menjelang pilkada serentak di tahun 2017 lalu, isu politik dan agama masih terus menjadi perbincangan publik.

Pada akhir tahun 2017 lalu, salah satu cabang perusahaan *youtube* yang berada di London mengundang 39 *youtuber* yang beberapa terbagi sebagai *brand ambassador* dan *fellows* dari 9 negara di dunia dan memperkenalkan salah satu konten yaitu *Youtube Creators for Change*. Di Indonesia sendiri *youtube channel* Cameo Project terpilih sebagai salah satu *Brand Ambassador* dan beberapa lainnya sebagai *Fellows*, seperti Gita Savitri Devi, Jovi Adhiguna, dan Film Maker Muslim (<https://www.youtube.com/creators-for-change/static/pdf/yearly-report.pdf>).

Melalui konten *Youtube Creators for Change* ini para *youtuber* ini mengusung isu multikulturalisme yang merespon adanya peningkatan politik identitas dan agama yang berlangsung hingga di tahun 2017 tersebut. *Youtube channel* Cameo Project, sebagai *brand ambassador* melakukan kegiatan secara langsung yang disebut *1nDONESia* dengan mengunjungi beberapa kota di Indonesia dan melaksanakan kegiatan *workshop* yang berisi materi-materi yang di bawakan oleh narasumber terpilih dan kegiatan produksi konten video bersama para peserta yang hadir (<https://www.youtube.com/creators-for-change/static/pdf/yearly-report.pdf>). Dalam videonya Gita Savitri Devi sendiri membiicarakan tentang *Hate Speech* yang menjadi hal yang sering diterima oleh kaum minoritas atas perbedaan yang mereka miliki. Dalam penelitian ini penulis hanya akan

mengambil satu video dari Gita dengan judul “*The hate you give*”, video ini merupakan video sosial eksperimen, dimana Gita mengundang tiga orang dengan berbagai golongan untuk memberikan tanggapan mengenai beberapa akun Instagram, lalu tanpa sepengetahuan tiga orang tersebut Gita juga telah menghadirkan orang-orang dari Instagram itu untuk bertemu dengan tiga orang tersebut (<https://www.youtube.com/watch?v=zJJGRF0xa7w&t=4s>). Sedangkan Jovi Adhiguna membicarakan fenomena *bullying*. Jovi memilih untuk mengundang tiga *subscribarnya* yang merupakan korban *bullying* untuk berbagi cerita tentang pengalaman saat mereka di *bully*, dampak yang mereka rasakan, dan masih banyak lagi (<https://www.youtube.com/watch?v=Ou5hreCo43A&t=1s>).

*Youtube Creators for Change* memiliki tujuan utama yaitu memaksimalkan kekuatan para *creators* yaitu dengan mengajak para subscribesnya untuk ikut menolak aksi intoleransi, kebencian, dan ekstremisme dan menyuarakan pendapat mengenai isu-isu sensitif seperti masalah keagamaan, sosial, politik, dan budaya yang terjadi di berbagai negara serta menyelipkan solusi-solusi untuk permasalahan tersebut melalui video yang mereka buat, juga membantu menciptakan perubahan sosial yang positif kepada seluruh *subscribers* maupun *non-subscribers* mereka (<https://www.youtube.com/creators-for-change/static/pdf/yearly-report.pdf>).

Dengan berkaca pada keadaan Indonesia pada saat itu, video-video ini berusaha untuk menggaungkan sebuah perubahan sosial dengan memperlihatkan masalah-masalah yang sering dijumpai oleh minoritas di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara dengan keberagaman yang sangat tinggi, mulai dari beragam agama, ras, suku, etnis, budaya dan golongan masyarakat. Oleh karena itu tak jarang muncul prasangka sosial yang menimbulkan stereotip, terjadinya diskriminasi, dan kesalahpahaman antara berbagai agama, ras, suku dan budaya tersebut. Meskipun Indonesia memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang diartikan sebagai berbeda-beda tapi tetap satu jua, nyatanya masih banyak sekali konflik antar masyarakat mayoritas dan minoritas yang akhirnya menimbulkan perpecahan pada persatuan Indonesia. Pancasila yang menjadi dasar negara, dimana didalamnya telah disebutkan mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan juga persatuan Indonesia. Yang artinya pemerintah dan masyarakat sepakat untuk selalu berupaya mewujudkan kerukunan dan sikap saling menghormati didalam kehidupan bermasyarakat. Melihat kondisi yang terjadi disekitar kita sekarang, isu ini kemudian menjadi sangat genting mengingat semakin meluasnya masalah-masalah yang terjadi. Para

*creators* yang terpilih memiliki begitu banyak *followers* (pengikut) dan cukup berpengaruh atau biasa di sebut *influencer*. Semakin gencarnya kegiatan yang di usung oleh *youtube* menandakan bahwa *youtube* sendiri melihat adanya peluang dengan begitu pesatnya perkembangan *youtube* di kalangan masyarakat. Dengan di buatnya konten *youtube creators for change* menjadi gebrakan baru untuk merespon keragaman dan masalah-masalah yang terjadi. Oleh karena itu, penulis akan menelisik bagaimana wacana minoritas yang dihadirkan dalam dua video milik Gita Savitri Devi dan Jovi Adhiguna.

## **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan dari latar belakang yang dibuat oleh penulis di atas bahwa dapat di tarik suatu rumusan masalah yang nantinya akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana wacana minoritas dalam konten *youtube creators for change*?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wacana minoritas dalam konten *Youtube Creators for Change*.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan yaitu hasil penelitian ini akan berguna sebagai bahan referensi dan inspirasi dalam penelitian selanjutnya. Khususnya untuk perkembangan studi Ilmu Komunikasi terutama mengenai wacana minoritas dalam Konten *Youtube Creators For Change*.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan yaitu hasil penelitian ini mampu menambah wawasan dan sudut pandang masyarakat mengenai bagaimana minoritas di Indonesia yang dihadirkan dalam konten *Youtube Creators for Change*.

## E. Tinjauan Pustaka

Jurnal pertama berjudul “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan dihadapan Hukum” yang di tulis oleh Danang Risdiarto pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode yudiris normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yaitu perundangan-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah saat ini sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas. Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan hak-hak minoritas di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan pembangunan yang berkeadilan serta perlakuan diskriminatif lainnya yang masih sering terjadi kepada mereka. Sudah sepatutnya pemerintah mengedepankan pendekatan berbasis HAM (*rights based approach*) dalam seluruh proses pembangunan program dan kebijakan yang disusun sesuai dengan upaya perlindungan serta pemenuhan hak-hak kelompok minoritas.

Jurnal berikutnya berjudul “Demokrasi Politik Minoritas di Indonesia” yang di tulis oleh M. Imaduddin Nasution. Jurnal ini pada awal pembahasannya, akan membahas konsep-konsep partisipasi dan representasi politik minoritas, persoalan integritas kelompok minoritas dalam entitas domisili mereka dan hak-hak identitas kelompok minoritas, yang harus diperjuangkan, dalam konteks politik minoritas dan politik identitas. Jurnal ini di tulis untuk memperlihatkan bagaimana politik minoritas di Indonesia, partisipasi politik kelompok minoritas tertentu dalam politik Indonesia, hak dan kewajiban minoritas, serta pengaruh keberadaan kelompok minoritas terhadap kehidupan politik di Indonesia.

Jurnal ketiga berjudul ”Multikultural dan Pendidikan” yang di tulis oleh Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si. Jurnal ini lebih membahas tentang multikultural dari segi pendidikan. Jurnal ini menjabarkan bagaimana keberhasilan membangun masyarakat yang multikultural dapat dilakukan melalui sistem pendidikan yang berdasarkan asas-asas demokrasi dan multikultural juga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana pendidikan multikultural di Indonesia sedangkan penulis memperlihatkan bagaimana wacana minoritas dalam masyarakat multikultural yang di hadirkan dalam sebuah konten youtube.

Penelitian keempat berjudul “Persepsi Mahasiswa Tentang Multikulturalisme Pengaruhnya terhadap Radikalisme Atas Nama Agama (Studi Deskriptif Dalam Konteks

pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia) yang di tulis oleh Gina Lestari pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Masalah yang menjadi kajian penelitian ini yaitu bagaimana persepsi mahasiswa tentang multikulturalisme pengaruhnya terhadap radikalisme atas nama agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa UPI Bandung menggambarkan kondisi keberagaman asal daerah, agama yang dianut serta sikap toleransi toleransi juga memiliki persepsi yang positif, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi mahasiswa tentang multikulturalisme terhadap persepsi mahasiswa tentang radikalisme atas nama agama berdasarkan pengujian regresi yang menunjukkan nilai R square sebesar 0,251 yang berarti bahwa variable X berpengaruh secara signifikan terhadap variable Y sebesar 25%.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, observasi dan studi dokumentasi sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi langsung dari dua video. Selain itu penelitian ini mengenai persepsi mahasiswa sedangkan penelitian penulis mengenai analisis wacana.

Jurnal berikutnya berjudul “Masyarakat Multikultural Bangsa Indonesia” yang di tulis oleh Suardi Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini membahas tentang multikulturalisme di Indonesia, apa saja penyebab terjadinya multikultural, pandangan tentang masyarakat multikultural, dampak keragaman di masyarakat, hal apa yang harus dihindari dalam masyarakat multikultural dan solusi masyarakat multikultural dalam berbagai paradigma. Jurnal ini dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai multikultural di Indonesia dan dampak-dampaknya pada masyarakat juga menghadirkan solusi dari berbagai sudut pandang. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis akan menganalisis kedua video konten *youtube creators for change* untuk melihat seperti apa wacana minoritas dalam masyarakat multikultural di Indonesia dari kacamata kedua *youtuber* tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Multikulturalisme dan Minoritas di Indonesia**

Multikultural yang secara etimologis berasal dari kata multi yang bermakna banyak atau beragam dan kultural yang bermakna budaya. Keragaman budaya

mengindikasikan bahwa ada beberapa jenis budaya yang mempunyai ciri khas khusus, yang berbeda dan bisa dibedakan satu sama lain. Paham atau ideologi mengenai multikultural disebut dengan multikulturalisme. Multikulturalisme pada dasarnya merupakan pandangan dunia yang pada akhirnya mampu diterjemahkan ke beberapa kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan atas realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Indonesia sendiri merupakan negara yang tidak hanya multikultural, namun juga multi etnis dan multiagama. (Rustanto B, 2015:39-40).

Menurut Will Kymlicka dalam bukunya yang berjudul "*Kewargaan Multikultural*" istilah multikultural mencakup berbagai macam bentuk pluralisme budaya yang berbeda dengan perbedaan tantangannya masing-masing, lahirnya kepedulian terhadap integritas para kelompok minoritas membuat multikulturalisme merefleksikan bentuk imperialisme budaya. Sementara itu, dalam bukunya tersebut pula Kymlicka juga memaparkan bahwa politik multikulturalisme merupakan politik yang membahas mengenai hak-hak minoritas, oleh sebab itu dikatakan bahwa politik multikulturalisme berdiri di antara hak untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan interpretasi terhadap hak bangsa-bangsa sebagaimana yang tertera dalam pasal 22 Piagam Banjul mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Bangsa-bangsa. Maka dengan demikian, politik multikulturalisme membuat negara liberal memperluas penghormatan atas otonomi kultural berbagai bangsa yang lain melalui pengakuan hak-hak kelompok minoritas. Dalam mendasari teorinya mengenai hak-hak kelompok minoritas, Kymlicka menjabarkan berbagai bentuk subjek hak yang berdasarkan subjek kolektif, diantara lain: (1) "Gerakan sosial baru", yang mencakup gerakan homoseksual, kaum miskin di wilayah urban, kaum difabel atau feminisme, (2) "minoritas nasional", yang mencakup kelompok masyarakat yang mampu mendirikan pemerintahan sendiri, namun diintegrasikan ke dalam bagian negara yang luas, misalnya seperti kelompok masyarakat Puerto Rico dan Navaho di Amerika Serikat, serta (3) "kelompok etnis" , yang mencakup kelompok imigran yang memilih untuk meninggalkan komunitas nasionalnya untuk masuk dalam kelompok masyarakat yang lain, misalnya seperti orang Asia, Afrika, Yahudi, Islam ataupun sebagainya di Amerika Serikat. Ketiga subjek tersebut mencerminkan ketiga hak kolektif yang

berbeda seperti, hak perwakilan khusus, hak memerintah sendiri dan hak polietnis. (Kymlicka, 2015).

Menurut Bikhu Parekh dalam bukunya yang berjudul *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* multikulturalisme dapat dilihat bukan sebagai doktrin politik dengan konten yang programatik bukan pula sebagai teori filosofis dari seseorang melainkan sebuah perspektif terhadap kehidupan manusia. Parekh juga mengungkapkan bahwa Multikulturalisme bukan mengenai perbedaan dan identitas *per se* namun mengenai berbagai hal yang telah tertanam dan dipertahankan oleh budaya, dimana yang digambarkan sebagai sebuah bentuk kepercayaan dan praktik dalam kelompok yang memahami diri mereka sendiri, konteks dunia dan mengatur sendiri kehidupan individu maupun kolektif yang mereka miliki. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa multikulturalisme membahas mengenai keberagaman kultural atau perbedaan yang tertanam berdasarkan budaya. (Parekh, 2005)

Sebagai tambahan diketahui pula bahwa Multikulturalisme juga merupakan sebuah respon masyarakat atau pemerintah terhadap isu keanekaragaman budaya dalam masyarakat, selain itu multikulturalisme menjadi suatu ideologi untuk melegitimasi masuknya keragaman etnis dalam struktur umum masyarakat termasuk dalam politik, multikulturalisme juga merupakan salah satu pilihan kebijakan publik untuk melahirkan kesatuan nasional dalam keragaman. (Suardi, 2017)

Masyarakat multikultural yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, bahasa dan lain-lain yang hidup pada satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu pemerintahan tapi pada masyarakat itu memiliki segmen-segmen yang sulit disatukan. (Rustanto, 2015:40) Keanekaragaman ini memunculkan berbagai pertanyaan penting dan secara potensial terpecah-pecah. Kaum minoritas dan mayoritas semakin sering berselisih tentang beragam hal misalnya hak berbahasa, otonomi daerah, perwakilan politik, kurikulum pendidikan, tuntutan lahan, imigrasi dan kebijakan naturalisasi, bahkan lambang-lambang nasional, seperti lagu kebangsaan atau hari-hari besar nasional (Kymlicka, Will.2002:1).

Indonesia yang memiliki keanekaragaman tentu tidak akan lepas dari konflik (Rstanto, B. 2015:67). Parsudi Suparlan (2002) mengamati bahwa terdapat dua kelompok yaitu kelompok dominan-minoritas, namun sukar untuk mengerti

mengapa kaum minoritas didiskriminasi, sebab besarnya populasi belum tentu kekuatannya juga besar (Rustanto, B. 2015:31). Menurut Joel A. Digirolamo (2010) konflik merupakan suatu proses yang diawali saat individu atau kelompok menjumpai adanya perbedaan dan pertentangan antara dirinya dengan individu atau kelompok lain mengenai kepentingan dan sumber daya, kepercayaan, dan nilai yang penting bagi mereka (Rustanto, B. 2015:68).

Dari penjabaran ini dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negeri multikultural, hal ini tercermin dari semboyan negari ini yaitu *Bhineka Tunggal Ika* yang memuat arti persatuan bangsa yang terdiri dari beragam bentuk kelompok manusia yang diketahui memiliki perbedaan yang dapat dikatakan multinasional dan polietnis. Di Indonesia sendiri tantangan yang dihadapi oleh multikulturalisme ditandai dengan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu akibat belum teratasinya isu etnosentrisme dalam masyarakat. (Hardiman, 2003)

Konflik yang terjadi dalam masyarakat multikultural yaitu munculnya prasangka dan diskriminasi. Diskriminasi adalah sebuah peristiwa yang sering di temui dalam masyarakat, hal ini dikarenakan oleh hasrat manusia untuk membedakan satu sama lain. Atau pada saat seorang individu diperlakukan dengan tidak adil sebab karakteristik suku, antargolongan, jenis kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan landasan dari perilaku diskriminasi. (Rustanto, B. 2015:60)

David O. Sears (1991) mengatakan bahwa prasangka sosial merupakan penilaian kepada kelompok atau individu tertentu yang utamanya disebabkan pada keanggotaan kelompok tersebut, yang dimana prasangka sosial dikhususkan kepada orang lain atau kelompok orang yang tidak sama dengannya atau kelompoknya. Prasangka sosial sendiri mempunyai bobot suka dan tidak suka terhadap objek yang diprasangkainya, dan hal ini akan memengaruhi sikap atau aksi seseorang yang memiliki prasangka tersebut (Rustanto, B. 2015:56).

Prasangka sosial terjadi disebabkan adanya perasaan berbeda dengan orang lain atau kelompok lain. Selain itu prasangka sosial disebabkan oleh adanya proses belajar, juga timbul disebabkan oleh adanya perasaan membenci antarindividu atau kelompok misalnya antara kelompok mayoritas dan minoritas. Komunikasi adalah salah satu bagian yang penting dalam proses belajar sosial. Banyak pengetahuan

mengenai kelompok lain diperoleh dari berita-berita yang ditayangkan baik melalui televisi, radio, maupun video. karenanya opini yang muncul terhadap kelompok lain bergantung pada isi dari pemberitaan media. contohnya apabila kelompok tertentu pada suatu berita ditampilkan sebagai ekstremis, suka kekerasan, dan teroris maka prasangka kepada kelompok yang diberitakan itu di masyarakat akan semakin menguat. Steplan (1978) menjelaskan bahwa prasangka sosial tidak hanya memengaruhi sikap orang dewasa, namun juga memengaruhi sikap anak-anak sehingga akan menghambat kesempatan mereka untuk tumbuh menjadi orang yang mempunyai rasa toleransi terhadap kelompok lemah misalnya minoritas (Rustanto, B. 2015:58-59).

Dalam logika sederhana, minoritas adalah setiap kelompok kecil dalam setiap wilayah. Dalam hal ini, minoritas adalah mereka yang jumlahnya kurang dari 50% jumlah penduduk di wilayah domisilinya. Status minoritas pada umumnya diberikan kepada kelompok kecil masyarakat, yang memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lebih besar. Perbedaan tersebut dapat berupa identitas ras, suku, budaya, bahasa, agama, pandangan politik dan bahkan orientasi sosial. (dikutip dari : <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%208%20JRV%20VOL%206%20NO%201.PDF>).

Isu minoritas seringkali memicu kontroversi berbagai pihak sehingga menghambat upaya penegakan HAM. Menurut Komnas HAM, masyarakat Indonesia secara umum masih awam dalam melihat kelompok minoritas. Sesuatu yang berbeda dengan *mainstream* atau kebiasaan umum seringkali dianggap asing, abnormal atau kesalahan. Pemahaman itu harus dibenahi karena konstitusi mengamanatkan semua manusia memiliki derajat yang sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi atas alasan apapun. Melihat keberagaman di Indonesia, Komnas HAM memasukkan beberapa kelompok dalam golongan minoritas seperti penyandang disabilitas, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), dan aliran politik minoritas. Dalam perspektif HAM, kelompok minoritas berada ditingkat setara dengan individu-individu pemangku hak yang lain. Namun karena kenyataannya kelompok minoritas adalah warga kelas yang ter subordinasi, maka dibutuhkan hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus bukanlah hak istimewa, tapi hak ini diberikan agar kelompok minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Hak khusus seperti ini penting untuk

mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. (dikutip dari : <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%208%20JRV%20VOL%206%20NO%201.PDF>)

Selain itu komnas HAM juga menawarkan ruang lingkup kelompok minoritas untuk konteks Indonesia adalah :

1. Kelompok minoritas ras

Secara kategorial, kelompok-kelompok minoritas rasial yang mendapat perhatian khusus dari komnas HAM meliputi tiga kelompok yaitu Tionghoa, etnis-agama seperti kelompok sikh, yahudi, tao dan lainnya, serta kelompok yang dalam UU Otonomi khusus papua disebut sebagai orang-orang asli papua.

2. Kelompok Minoritas Etnis

Definisi etnis dipahami sebagai penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Jika dihubungkan dengan penggolongan etnis, aspek bahasa sebenarnya menjadi elemen penting yang membedakan satu etnis dengan etnis lain. Maka keragaman etnis yang didasari dari perbedaan-perbedaan bahasa merupakan fakta tingginya tingkat keragaman di tengah masyarakat Indonesia.

3. Kelompok minoritas agama dan keyakinan

Negara melakukan pengutamaan pada enam agama yang disebut dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNSPS/1965, yang memberika jaminan kebebasan dan fasilitas serta bantuan-bantuan perlindungan. TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah menegaskan bahwa “aliran kepercayaan terhaap Tuhan yang maha esa tidak merupakan agama”. Hal ini jelas merupakan tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang kepercayaannya tidak dimasukkan sebagai agama.

4. Kelompok penyandang disabilitas

Siapa yang disebut sebagai “penyandang disabilitas” dalam hal ini termasuk mereka yang memilik keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangan waku lama, ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, keterbatasan tersebut dapat menghalangi partisipasi

mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan.

5. Kelompok minoritas berdasarkan identitas Gender dan orientasi seksual  
Focus pembahasan kelompok minoritas ini ditujukan bagi kelompok LGBTI (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseksual) yang sehari-hari mengalami bukan hanya tindakan diskriminatif, namun juga berbagai kekerasan karena dianggap “menyimpang”.

Perlindungan untuk minoritas pada situasi global saat ini menjadi makin kompleks. Berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh dunia internasional belum seluruhnya menyentuh pemenuhan hak-hak minoritas. Padahal berbagai pengalaman dan studi telah menunjukkan bahwa kelompok yang paling rentan dan paling miskin pada umumnya berasal dari kelompok minoritas, baik minoritas secara etnis, maupun agama. Hadirnya demokrasi juga tidak serta merta menjamin pemenuhan serta perlindungan hak minoritas. Berbagai pengalaman proses demokrasi di banyak negara menunjukkan bahwa hak-hak minoritas tetap terabaikan meskipun demokrasi telah dipraktikkan (sistem keartaaian, pemilihan langsung, dll) kepentingan minoritas tetap tidak terwakili. (dikutip dari: <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%208%20JRV%20VOL%206%20NO%201.PDF>).

## 2. Media Sosial

Istilah media menurut Laughey (2007) dan Mcquail (2003) dapat diartikan seperti sebuah alat komunikasi sebagaimana pengertian yang telah kita tau. definisi media ini biasanya lebih terhadap sifatnya yang massa karena di tinjau dari berbagai teori yang di pakai pada komunikasi massa. Tetapi, semua pengertian yang telah ada mempunyai kecenderungan bahwa ketika menggunakan kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu ialah fasilitas yang disertai dengan teknologi. Diluar dari cara pandang melihat media dari bentuk dan teknologinya, pengungkapan kata ‘media’ bias dimaknai dengan melihat dari proses komunikasi (Meyrowitz, 1999; Moores, 2005; Williams, 2003). Terjadinya komunikasi memerlukan tiga proses, yaitu objek, organ dan medium. mata adalah sebuah organ saat kita menonton televisi gambar atau visual merupakan perantara antara televisi dan mata. Contoh tadi menunjukkan bahwa media adalah medium untuk mengirim pesan dari proses komunikasi (Nasrullah, R. 2015: 3)

Kata “sosial” pada media sosial mendekati bidang sosiologi.. Inilah yang menurut Fuchs (2014) terdapat berbagai pertanyaan dasar saat melihat kata sosial, contohnya terkait dengan informasi dan kesadaran. Dalam teori sosiologi disebutkan dari masyarakat dan faktor yang berasal dari masyarakat yang digambarkan dalam wujud teknologi yang dipakai (Nasrulli, R. 2015:6)

Lalu, untuk Media Sosial sendiri, Fuchs memulainya dengan perkembangan kata Web 2.0 yang dipopulerkan oleh O’Reilly (2005). Web 2.0 merujuk dari media internet yang bukan hanya perantara antara individu dengan perangkat (teknologi dan jaringan) komputer seperti yang sering terjadi pada web 1.0, namun sudah mengaitkan individu untuk mempublikasikan secara bersamaan, saling mengolah dan memperbanyak data, web sebagai *platform* atau program yang dapat dikembangkan, lalu pada pemakaian dengan jaringan dan alur yang begitu panjang (*the long tail*). Menurut Van Dijk (2013), media sosial merupakan sebuah *platform* media yang mengacu pada eksistensi pengguna yang mewadahi mereka selama beraktivitas ataupun berkolaborasi. Lantas, media sosial bisa dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang mempererat hubungan antara pengguna dan menandakan adanya ikatan sosial (Nasrullah, R. 2015:11).

Karakteristik media sosial yang terbuka dalam menginovasikan konten, interaktif, sampai pada jaringan yang luas memberikan sebuah penegasan bahwa hubungan tersebut memiliki dua sisi. Di satu sisi, media secara intuitif memfasilitasi perangkat dan aplikasi-aplikasi yang dapat diatur di Internet, di sisi lain, khalayak sepenuhnya membuat konten dengan menggunakan perangkat media berdasarkan kebutuhannya sendiri (Nasrullah, R. 2015: 95)

Media sosial menyediakan ruang kepada penggunanya untuk mengutarakan pendapat dan pandangannya pada sistem demokrasi. Media sosial seperti menghadirkan panggung untuk pengguna sebagai masyarakat agar ikut serta mengutarakan hal yang menjadi keresahannya yang belum terdengar. Media sosial muncul dengan menggiring nilai-nilai baru untuk para penggunanya. Media sosial kini tidak hanya digunakan untuk membangun citra diri namun telah berkembang menjadi wadah aspirasi masyarakat secara *online*. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan media sosial mampu merombak sistem tradisional pada bidang demokrasi. Kini sebuah isu tidak lagi memerlukan banyak partisipan untuk menggerakkan massa, tetapi hanya dengan seorang pengguna media sosial saja sudah mampu membuat sebuah perubahan. (Nasrullah, R. 2015:128-129) .

### 3. Analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough

Analisis wacana merupakan kajian linguistik yang mengulas bagaimana pengguna bahasa memahami apa yang ditulis oleh para penulis dalam buku-buku teks dan mengerti apa yang disampaikan penyapa secara lisan dalam percakapan. (Piliang & Jaelani, 2018, hal. 148). Penelitian sosial ini disebut “kritis” dikarenakan menganalisis ‘ketidakberesan dalam masyarakat’ (ketidakadilan, ketidaksetaraan, diskriminasi, ketidakbebasan) dengan mencari penyebabnya serta karakter perlawanan yang mungkin (Haryatmoko, 2016: 2-3).

AWK tertarik pada bagaimana bahasa dan wacana dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, termasuk untuk membangun kohesi sosial atau perubahan-perubahan sosial. Wacana adalah proses semiotik yang merepresentasikan dunia sosial. Oleh karena itu objek AWK sumber data: dokumen, kertas diskusi, perdebatan parlemen, pidato, film, kartun, foto, koran, iklan atau brosur (Haryatmoko, 2016: 4)

Analisis AWK mengarah pada: menganalisis sesuatu yang terjadi dengan berfokus pada apakah kejadian itu mempertahankan tatanan sosial yang telah ada, menggantinya atau memperbaruinya. Tidak hanya dengan menandai ketidakadilan, bahaya, penderitaan dan prasangka, AWK memeriksa pemecahan masalah dari penyelewengan dan masyarakat yang penuh ketegangan atau konflik. Masalah sosial itu disebabkan oleh ketidakbijaksanaan dan penyelewengan bahasa atau bentuk lain dalam komunikasi. AWK mempertajam instrument untuk menambah kesadaran dan memperlihatkan jalan perubahan (Haryatmoko, 2016: 5).

AWK berasumsi bahwa bahasa dipakai untuk berbagai fungsi dan bahasa memiliki berbagai konsekuensi. Bisa digunakan untuk memerintah, memengaruhi, mendeskripsi, mengiba, memanipulasi menggerakkan kelompok atau membujuk. Setiap pemakaian bahasa memiliki konsekuensi-konsekuensi, baik yang bisa diramalkan maupun yang tidak diharapkan. Bahasa juga merupakan metode kontrol sosial yang sangat kuat, sehingga dapat dibantah dan patut diperdebatkan. Bahasa menentukan pra-syarat untuk memperluas praktik-praktik sosial dan persetujuan-persetujuan sosial. (Haryatmoko, 2016:5-6).

AWK memiliki tujuan-tujuan yaitu: pertama, menguraikan praktik wacana yang menggambarkan atau mengkonstruksi masalah sosial; kedua, meneliti bagaimana ideologi dibekukan dalam bahasa dan mendapatkan cara bagaimana mencairkan ideologi yang membekuk bahasa atau kata; ketiga, menambah kesadaran agar peka pada ketidakadilan diskriminasi, prasangka dan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan; keempat, berkontribusi dalam memberikan penyelesaian masalah terhadap hambatan-hambatan yang mencegah perubahan sosial. sehingga dibutuhkan peninjauan relasi antara bahasa dan ideologi dengan cara memperlihatkan pemahaman bahasa pada relasi kekuasaan dan relasi sosial (Haryatmoko, 2016: 14)

Fairclough menghadirkan empat langkah metode AWK. *Pertama*, memusatkan pada suatu ‘ketidakberesan sosial’, pada bagian semiotiknya. Ketidakberesan sosial diketahui sebagai aspek-aspek sistem sosial, bentuk dan kebijakan yang memberatkan atau mengacaukan ketentraman bersama, yang dapat diperbaiki meskipun harus melewati perubahan-perubahan yang radikal dari sistem. Ketidakberesan sosial itu melingkupi kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi, kurangnya kebebasan atau rasisme. *Kedua*, mencari tau mengenai hambatan untuk membereskan ‘ketidakberesan sosial’. Pada fase ini, pendekatan pada ketidakberesan sosial dilalui dengan cara yang tidak langsung, yaitu dengan menanyakan cara bagaimana kehidupan sosial diorganisir dan distruktur sehingga menahannya dari upaya menyelesaikannya (Haryatmoko, 2016:19-21).

*Ketiga*, mengidentifikasi apakah kebijakan sosial “memerlukan” ketidakberesan sosial. Apabila suatu sistem sosial dapat ditunjukkan menghasilkan ketidakberesan sosial yang besar, maka menjadi alasan untuk mempertimbangkannya agar diubah. *Keempat*, menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan rintangan-rintangan. Analisis di tahap ini akan mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan dalam proses sosial yang ada untuk mengatasi hambatan-hambatan menangani ketidakberesan sosial (Haryatmoko, 2016: 21).

Fairclough menguraikan tiga dimensi penting dalam AWK yakni: teks, praktik diskursif dan praksis sosial. *Pertama*, teks, ialah semua yang mengarah ke wicara, tulisan, grafik, dan perpaduannya atau semua bentuk

linguistik teks (khasanah kata, gramatika, *syntax*, tatanan metafora, teks pidato). *Kedua*, praktik diskursif, ialah berbagai bentuk produksi dan konsumsi teks. Dalam dimensi ini ada proses menghubungkan produksi dan konsumsi teks atau telah ada interpretasi. Intinya mengacu ke bagaimana pengarang teks membuat wacana dan *genre* yang ada dengan mengkhawatirkan bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan. *Ketiga*, praksi sosial sering kali terdapat pada tujuan, jaringan dan praksi tradisi sosial yang beragam (Haryatmoko, 2016: 23).

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah suatu metode berganda pada fokus, yang mengimplikasikan pendekatan interpretative dan wajar terhadap tiap inti masalah yang ditelitinya. Hal ini menandakan bahwa penelitian kualitatif mengacu pada penelitian yang bersifat alamiah, dan berusaha mengerti dan memberikan pemaknaan pada fenomena yang dilihat dari pengertian yang diberikan orang lain terhadap fenomena tersebut. (Salim, Agus. 2006:34). Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif: Conny (2010: 60), jenis penelitian deskriptif memaparkan langsung dan menggambarkan satu persatu dari apa yang peneliti teliti. Data deskriptif menjelaskan bahwa data tersebut berupa teks.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu dua video dari Gita Savitri Devi dan Jovi Adhiguna. Gita Savitri Devi membuat video sosial eksperimen dengan judul “*the hate you give*” yang mengangkat isu *hate speech*. Sedangkan Jovi Adhiguna mengangkat tema fenomena *bullying*. Jovi memilih untuk mengundang beberapa korban *bullying* untuk berbagi cerita tentang bagaimana dulunya saat mereka di *bully*, dampak yang mereka rasakan, dan masih banyak lagi.

### 3. Sumber Data

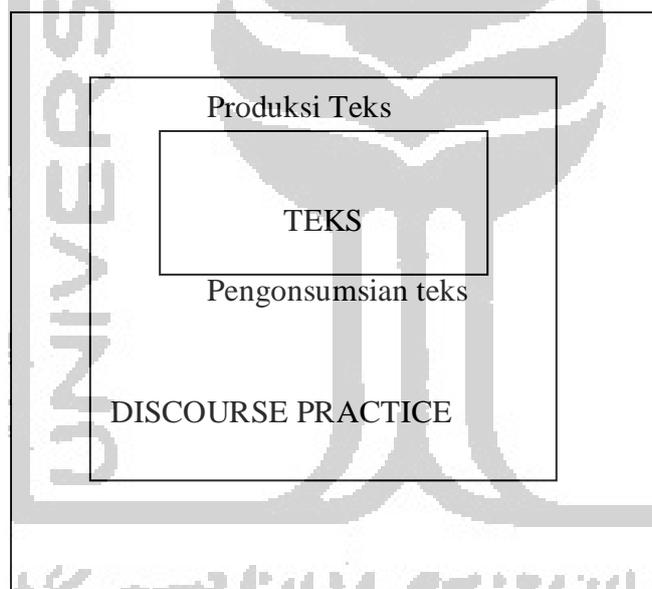
Penulis mengambil data dari dua video di youtube yang di unggah oleh Gita Savitri Devi dan Jovi Adhiguna.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini di katakan bahwa, pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang paling utama ialah observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi serta gandingan ketiganya (Sugiyono, Dr. 2017:293). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan studi dokumentasi dari dua video konten *youtube creators for change* dari channel youtube milik Gita Savitri Devi dan Jovi Adhiguna. Peneliti akan menganalisis setiap adegan dalam video-video tersebut menggunakan analisis wacana menurut Norman Fairclough.

#### 5. Teknik Analisis Data

Model tiga dimensi Fairclough (2007: 127) :



(Gambar 1.1 Analisis wacana kritis Norman Fairclough)

##### a. Analisis Teks

Menurut Fairclough teks tidak hanya memperlihatkan bagaimana suatu objek ditampilkan tetapi juga bagaimana hubungan antarobjek itu didefinisikan. Setiap teks dapat diuraikan lalu dianalisis dengan unsur-unsur antara lain representasi, relasi, dan identitas (Narendra, 2008).

Tabel 1.0  
Elemen Dasar dalam Analisis Teks Fairclough

UNSUR	YANG INGIN DILIHAT
Representasi	Bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apa pun ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
Relasi	Bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
Identitas	Bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks.

Sumber: Eriyanto (2001:289)

Representasi pada dasarnya ingin melihat bagaimana seseorang, kelompok, tindakan, kegiatan ditampilkan dalam teks. Representasi menurut Fairclough melihat dua hal yaitu bagaimana seseorang, kelompok, dan gagasan ditampilkan dalam anak kalimat dan gabungan atau rangkaian anak kalimat. Kalau representasi berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang, kelompok, kegiatan, tindakan dan keadaan atau sesuatu ditampilkan dalam teks, maka relasi berhubungan dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan. Media disini dilihat sebagai suatu ruang sosial, di mana semua kelompok, golongan dan khalayak yang ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan versi pendapat dan gagasannya (Eriyanto, 2001). Aspek identitas terkait dengan bagaimana identitas wartawan ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks pemberitaan. Menurut Fairclough, apa yang menarik adalah bagaimana wartawan menempatkan dan mengidentifikasi dirinya dengan masalah atau kelompok sosial yang terlibat. Apakah wartawan ingin mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari khalayak ataukah menampilkan dan mengidentifikasi dirinya secara mandiri. Akan tetapi identitas bukan hanya berkaitan dengan wartawan,

namun juga berkaitan dengan bagaimana partisipan publik dan khalayak diidentifikasi (Narendra, 2008).

b. Discourse Practice

Analisis *discourse practice* berfokus pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Teks dibentuk melalui sebuah praktik diskursus, yang akan menentukan bagaimana teks itu diproduksi. Faktor utama dari pembentukan wacana ini yaitu pembuat teks. Hal ini melingkupi latar belakang pendidikan, perkembangan profesional dan orientasi politik dan ekonomi. Pemahaman pada nilai dan kepercayaan serta sudut pandang pembuat teks juga dapat mempengaruhi proses produksi teks (Eriyanto, 2001).

c. Sociocultural Practice

Analisis *sociocultural practice* didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media mempengaruhi wacana yang muncul. Analisis ini menampilkan bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat memaknai dan menyebarkan ideologi yang dominan kepada masyarakat. Menurut Fairclough, hubungan itu tidak terjadi secara langsung namun dimediasi oleh *discourse practice* (Eriyanto, 2001).